

**FAKTOR-FAKTOR PENENTU TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN DAERAH MELALUI E-
GOVERNMENT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Dian Pratiwi Pitri¹, Verawaty², Citra Indah Merina²
Dosen Universitas Bina Darma^{2,2}, Mahasiswa Universitas Bina Darma¹
Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang
**Pos-el: dianpratiwipitri@gmail.com , verawaty_mahyudin@yahoo.com ,
citra_ims@yahoo.com**

ABSTRACT: *The purpose of this study was to determine whether there is influence of original income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Shopping Area, (BD), Size of Government (UP), Ratio Financing Debt (RPH), Level of Complexity Government (TKP), Quality of Financial Statements (KLK), Level of Public Welfare (TKM) of the Local Government Finance Information Transparency in Government District / town in Sumatera Selatan. The population in this study is the District / City in South Sumatra province consisting of 15 District / City of the Year 2014. This study uses secondary data such as budget realization report 2014 and 2015, gross regional domestic product data in 2014 and observations by e-government TIKD. Testing the hypothesis in this study using binary logistic regression analysis with t-test, f. The results showed that the BD, UP, TKM positive effect on TIKD. Meanwhile, PAD, DAU, RPH, crime scene, as well as KLK no positive effect on TIKD. Simultaneously variable PAD, DAU, BD, UP, RPH, TKP, KLK, TKM significant effect on TIKD. For local government is expected to be considered in an effort to improve the implementation of e-government in particular areas of accounting transparency Transparency Local Government Financial Information.*

Keywords: *Influence of original income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Shopping Area, (BD), Size of Government (UP), Ratio Financing Debt (RPH), Level of Complexity Government (TKP), Quality of Financial Statements (KLK), Level of Public Welfare (TKM)*

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah, (BD), Ukuran Pemerintah (UP), Rasio Pembiayaan Hutang (RPH), Tingkat Kompleksitas Pemerintah (TKP), Kualitas Laporan Keuangan (KLK), Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (TKM) terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 15 Kabupaten/Kota Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran 2014 dan 2015, data produk domestik regional bruto tahun 2014 dan observasi melalui e-government TIKD. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis *binary logistic regression* dengan uji t, uji f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BD, UP, TKM berpengaruh positif terhadap TIKD. Sedangkan, PAD, DAU, RPH, TKP, serta KLK tidak berpengaruh positif terhadap TIKD. Secara simultan variabel PAD, DAU, BD, UP, RPH, TKP, KLK, TKM berpengaruh signifikan terhadap TIKD. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerapan e-government bidang akuntansi khususnya keterbukaan Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata kunci: *Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah, (BD), Ukuran Pemerintah (UP), Rasio Pembiayaan Hutang (RPH), Tingkat Kompleksitas Pemerintah (TKP), Kualitas Laporan Keuangan (KLK), Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (TKM) serta Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah.*

1. PENDAHULUAN

Transparansi merupakan isu utama dalam pemerintah yang demokratis. Pemerintah yang demokratis membutuhkan akuntabilitas kepada publik guna meningkatkan transparansi dalam mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai informasi keuangan daerah. Pentingnya transparansi keuangan dan kinerja badan publik pemerintah juga semakin ditegaskan dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan terkait informasi mengenai laporan keuangan.

Sebagaimana yang ditetapkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan standar untuk menyusun komponen-komponen laporan keuangan pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Dimana, komponen laporan keuangan yang telah ditetapkan untuk pemerintah daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan transparansi publik oleh masyarakat, baik pusat maupun daerah. Pada dasarnya, transparansi publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja

keuangan pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik pemerintah pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu, hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2002).

Peningkatan transparansi dapat dilihat dari ketersediaan suatu informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut untuk publik, maka salah satu cara yang paling efektif dalam melaksanakan keterbukaan informasi keuangan publik adalah menggunakan media elektronik yaitu situs resmi. Styles dan Tennyson (2007) berpendapat bahwa internet merupakan media yang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat dan merupakan sarana dengan biaya yang paling efektif untuk mempublikasikan informasi keuangannya dalam bentuk pelaporan *online*. Di Indonesia, penggunaan internet akan sangat membantu dalam menyelesaikan program *e-government* dalam membangun sistem informasi keuangan daerah.

Dalam penelitian ini, aspek yang akan dibahas yaitu, pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), belanja daerah, ukuran pemerintah, rasio pembiayaan hutang, tingkat kompleksitas pemerintah, kualitas laporan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian

transparansi informasi keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota belum pernah dilakukan di provinsi Sumatera Selatan. Hingga saat ini belum ada, penelitian ini hanya berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan *website* pemerintah dalam mewujudkan *e-government*.

Kedua, dalam penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu dana alokasi umum. Penelitian Nainggolan dan Purwanti (2016) menggunakan 7 (tujuh) variabel independen dan disini peneliti menambahkan satu variabel yaitu dana alokasi umum. Peneliti menambahkan variabel dana alokasi umum karena dana alokasi umum menjadi tolak ukur untuk menilai pengungkapan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintah yang baik.

Ketiga, pemilihan objek penelitian yaitu pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Transparansi akan pengelolaan informasi keuangan di Sumatera Selatan masih sangat minim dikarenakan masih banyak peraturan daerah tentang transparansi tidak memiliki sanksi khusus, sehingga dalam pelaksanaan dan penagakannya masih sulit dan sering kali menemui kendala. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan diambil apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja daerah, ukuran pemerintah, rasio pembiayaan hutang, tingkat kompleksitas pemerintah, kualitas laporan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh

positif terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja daerah, ukuran pemerintah, rasio pembiayaan hutang, tingkat kompleksitas pemerintah, kualitas laporan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi dalam Pemerintahan

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak (*agent*) setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (*principal*) di mana masing-masing memiliki keinginan memaksimalkan keuntungan dan tidak ada alasan untuk mempercayai agen akan selalu bertindak sesuai keinginan *principal* oleh karena itu, akan timbul biaya agen dalam rangka memberikan keyakinan pada *principal* (Godfrey, 2010 dalam Nainggolan dan Purwanti, 2016).

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan yaitu, hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai prinsipal) yang menggunakan pemerintah (sebagai agent) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara transparansi.

2.2 Teori Sinyal dalam Pemerintahan

Teori sinyal menjelaskan bagaimana manajemen (*agent*) memberikan sinyal keberhasilan atau kegagalan kepada pemilik (*principal*). Sinyal berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Teori sinyal berawal dari gagasan asimetri informasi yang menjelaskan bahwa beberapa transaksi ekonomi, kesenjangan akses terhadap informasi dapat mengganggu pasar normal dalam perdagangan barang maupun jasa (Nainggolan dan Purwanti, 2016).

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, Pemerintah bertanggung jawab memberikan informasi atau sinyal pada masyarakat untuk memberikan keyakinan yang memadai pada masyarakat. Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Tentu dengan diseminasi melalui keunggulan *internet* dengan fasilitas *e-government* seperti ini dapat didistribusikan lebih cepat dan dapat dieksploitasi untuk lebih membuka diri dengan menginformasikan laporan keuangannya.

2.3 E-Government

E-government merupakan suatu proses sistem pemerintah dengan memanfaatkan ICT (*information, communication, and technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada masyarakat, organisasi bisnis, dan antara lembaga pemerintah serta stafnya sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Penerapan *e-government* bertujuan untuk menciptakan serta memperbaiki kualitas interaksi antara pemerintah dengan berbagai pihak, yaitu

pemerintah dengan warga negara atau *Government to Citizen* (G to C), interaksi pemerintah dengan swasta atau *Government to Business* (G to B), serta interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan pemerintah atau *Government to Government* (G to G) maupun bentuk-bentuk interaksi lainnya.

2.4 Transparansi Informasi Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2002), transparansi keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2.5 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.6 Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor

59 Tahun 2007, Belanja Daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

2.7 Ukuran Pemerintah

Menurut Patrick (2007) dalam Liestiani (2008), ukuran pemerintah merupakan besarnya suatu pemerintah. Ukuran daerah merupakan indikator yang signifikan untuk kepatuhan akuntansi. Pemerintah yang memiliki ukuran besar akan dihadapkan dengan persyaratan koordinasi dan birokratisasi yang semakin meningkat, sehingga mengakibatkan tugas manajemen menjadi lebih sulit serta akan memiliki tekanan yang lebih besar dari publik untuk melaporkan pengungkapan wajibnya.

2.8 Rasio Pembiayaan Hutang

Menurut Styles dan Tennyson (2007), berpendapat bahwa dengan melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintah saat ini akan memberikan dampak pada kemampuan pemerintah daerah memberikan pelayanan dan program terpadu bagi masyarakat dimasa yang akan datang.

2.9 Tingkat Kompleksitas Pemerintah

Pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang lebih dalam melayani kebutuhan warganya. Semakin kompleks permasalahan di suatu daerah, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi warganya. Untuk itu diperlukan adanya transparansi dalam setiap tindakan pemerintah daerah, termasuk transparansi dalam mengelola keuangan daerah.

2.10 Kualitas Laporan Keuangan

Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Atril dan McLaney (1991) dalam Nainggolan dan Purwanti (2016), menyebutkan kriteria yang harus dimiliki oleh pelaporan keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna, diantaranya adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dimengerti, tepat waktu dan biaya/manfaat.

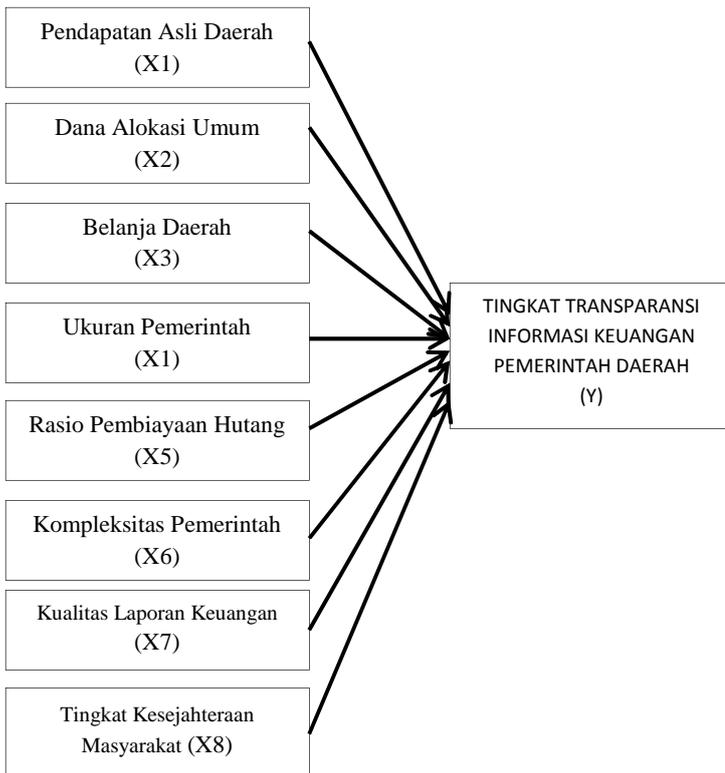
2.11 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan demi menciptakan individu atau masyarakat yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan kemudian individu atau masyarakat tersebut dapat mengatasi masalah sosialnya sendiri. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan PDRB per kapita dari setiap daerah.

2.12 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan transparansi informasi keuangan daerah telah banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian yang telah dilakukan Verawaty (2015), melakukan penelitian terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses data keuangan pemerintah lokal pada internet. Pada umumnya penelitian sudah dilakukan pada beberapa negara maju seperti Amerika. Namun penelitian ini mulai dilakukan di negara berkembang, seperti Indonesia. Penelitian terkait dengan transparansi di Indonesia mulai dilakukan oleh beberapa peneliti. Diantaranya dilakukan oleh Liestiani (2008), Lesmana (2010), Rora (2010), Medina (2012), Syafitri (2012), Verawaty (2015), Nainggolan dan Purwanti (2016).

2.12 Kerangka Pemikiran



2.12 Pengembangan Hipotesis

- H₁ : *Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah*
- H₂ : *Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah*
- H₃ : *Belanja daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah*
- H₄ : *Ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah*
- H₅ : *Rasio pembiayaan hutang berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah*
- H₆ : *Tingkat kompleksitas pemerintah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah*

H₇ : *kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah*

H₈ : *Tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah*

3. Metodologi Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan hingga Desember 2014. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan realisasi anggaran 2014 dan 2015, data produk domestik regional bruto tahun 2014 dan observasi melalui *e-government* TIKD yang terdapat dalam *website* Badan Pusat Statistik dan *website*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2016) serta *website* resmi pemerintah daerah. Penarikan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah 17 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan hingga 31 Desember dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peneliti.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 1

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	15	.87	.96	.90,80	.2,111
DAU	15	8.55	9.08	8.73,60	.15,833
BD	15	.92	.96	.93,33	.1,047
UP	15	.95	.98	.95,80	,941
RPH	15	.013	9.70	5.32,60	3.18,927

TKP	15	132.498	1.558.49	538.75	368.236,15
			4	3,60	8
KLK	15	0	1	,80	,414
TKM	15	3.13	11.51	5.46,73	2.01,409
TIKD	15	0	1	,53	,516
Valid N (listwise)	15				

Berdasarkan tabel statistik deskriptif variabel penelitian, terlihat bahwa dari 15 kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian, variabel PAD mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.90,80 dengan standar deviasi sebesar 0.2,111 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai rata-rata PAD. Demikian pula nilai minimum sebesar 0.87 yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 0.96 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

DAU mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 8.73,60 dengan standar deviasi sebesar 0.15,833 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai rata-rata DAU. Demikian pula nilai minimum sebesar 8.55 yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 9.08 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

BD mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.93,33 dengan standar deviasi sebesar 0.1,047 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai rata-rata BD. Demikian pula nilai minimum sebesar 0.92 yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 0.96 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

UP mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.95,80 dengan standar deviasi sebesar 0.0941 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai rata-rata UP. Demikian pula nilai minimum sebesar 0.95 yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan

nilai maksimum sebesar 0.98 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

RPH mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 5.32,60 dengan standar deviasi sebesar 3.18,927 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai rata-rata RPH. Demikian pula nilai minimum sebesar 0.013 yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 9.70 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

TKP mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 538.753,60 dengan standar deviasi sebesar 368.236,158 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai rata-rata TKP. Demikian pula nilai minimum sebesar 132.498 yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 1.558.494 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

KLK mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.80 dengan standar deviasi sebesar 0.414 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai rata-rata KLK. Demikian pula nilai minimum sebesar 0 yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 1 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

TKM mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 5.46,73 dengan standar deviasi sebesar 2.01,409 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai rata-rata TKM. Demikian pula nilai minimum sebesar 3.13 yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 11.51 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

TIKD mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.53 dengan standar deviasi sebesar 0.516 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai rata-rata TIKD. Demikian pula nilai minimum sebesar 0

yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 1 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

4.2 Analisis Regresi

Tabel 2

Uji Nilai Likelihood

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	7,989	8	,001
	Block	7,989	8	,001
	Model	7,989	8	,001

Sumber: Diolah dari data penelitian

Omnibus test dilakukan untuk menilai apakah model secara keseluruhan cocok (fit) dengan data yang tersedia. Pada model ini diperoleh nilai sig 0,001 yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk signifikan dan cocok dengan data.

Tabel 2

Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	12,738a	,413	,551

Sumber: Diolah dari data penelitian

Koefisien Determinasi adalah bagian dari variasi total dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen (variabilitas). Hal ini ditunjukkan dengan nilai R^2 . Penelitian ini memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,551. Artinya hanya 55,1% variabel pengungkapan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah dapat diterangkan dengan variabel bebas dalam penelitian ini. Sisanya sekitar 44,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Tabel 3

Uji Nilai *Hosmer and Lemeshow Test*

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	Df	Sig.
1	2,840	6	,829

Sumber: Diolah dari data penelitian

Hosmer and lemeshow test digunakan untuk menilai kelayakan keseluruhan dari suatu model regresi. Suatu model dinyatakan layak jika memiliki nilai $p > 0,05$. Hasil nilai menunjukkan nilai sig 0,829. Hal ini menunjukkan model sudah tepat dan mampu menjelaskan data yang ada.

Tabel 4

Menilai Akurasi Model

Classification Table ^a				
		Predicted		
		TIKD		Percentage Correct
	Observed	0	1	
Step 1	TIKD 0	6	1	85,7
	1	2	6	75,0
Overall Percentage				80,0

Sumber: Diolah dari data penelitian

Dari 7 kabupaten/kota yang tidak memiliki/tidak ada pengungkapan informasi keuangan daerah, sebanyak 6 data (85,7%) dapat diprediksi oleh model. Dari 8 kabupaten/kota yang ada mengungkapkan informasi keuangan daerah, hanya 6 (75%) yang dapat diprediksi oleh model. Jika keberadaan pengungkapan informasi keuangan daerah dianggap sebagai variabel yang ingin diprediksi, maka dapat dikatakan sensitifitas model adalah 85,7%. Secara keseluruhan akurasi model adalah 80%..

Tabel 5

Model Regresi yang dihasilkan

Variables in the Equation		B	Sig.	Exp(B)
Step 1 a	PAD	-1,495	,190	,224
	DAU	,203	,450	1,225
	BD	,015	,004	1,015
	UP	,043	,006	1,043
	RPH	-,003	,943	1,000
	TKP	,000	,977	1,000
	KLK	-4,412	,296	,012
	TKM	,021	,005	1,021
	Constant	106,694	,552	,000

Sumber: Diolah dari data penelitian

Hasil pemodelan regresi logistik yang ditampilkan dalam tabel diatas menunjukkan Nilai B koefisien dari setiap variabel bebas yang di uji. Sementara Nilai EXP (B) menunjukkan besar kemungkinan adanya pengungkapan informasi keuangan pada setiap pemerintah daerah. Setelah melakukan analisis regresi dari tabel diatas, maka nilai-nilai koefisien regresi tersebut dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{TIKD} = & 106,694 - 1,495 \text{ PAD} + 0,203 \text{ DAU} + 0,015 \text{ BD} + \\
 & 0,043 \text{ UP} - 0,003 \text{ RPH} + 0,000 \text{ TKP} - 4,412 \text{ KLK} + \\
 & 0,021 \text{ TKM} + e
 \end{aligned}$$

4.3 Pembahasan

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah

Hasil pengujian pertama (H₁) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi pada tabel 4.16. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif terhadap transparansi

informasi keuangan daerah dengan PAD memiliki koefisien regresi -1,495 dan nilai signifikansi 0,190 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (=5%). Hasil analisis tersebut konsisten dengan hasil penelitian Rora (2012) serta Nainggolan dan Purwanti (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Akan tetapi, hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Jeckly dan Eka (2014) yang menyatakan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat belum bisa memotivasi pemerintah untuk dapat melakukan pengungkapan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Masyarakat cenderung hanya melaksanakan kewajiban tanpa menuntut hak. Peran pemerintah (agen) dan masyarakat (partisipal) kurang dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas dana transfer dirasa masih tinggi sehingga menyebabkan pengungkapan PAD tidak menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah. Dengan demikian PAD tidak dapat dijadikan indikator dalam menentukan transparansi informasi keuangan daerah. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa PAD berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah

Hasil pengujian kedua (H_2) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi pada tabel 4.16. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah dengan DAU memiliki koefisien regresi 0,203 dan nilai signifikansi 0,450 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Syafitri (2012) dan Liestiani (2008) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Laswad (2005) serta Jeckly dan Eka (2014) yang menyatakan dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa DAU yang merupakan dana transfer yang bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah dan jumlah yang dialokasikan pun tidak terlalu besar tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan transparansi informasi keuangannya. Dengan demikian DAU tidak dapat dijadikan indikator dalam menentukan transparansi informasi keuangan daerah. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa DAU berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

3. Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah

Hasil pengujian ketiga (H_3) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi pada tabel 4.16. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah dengan BD memiliki koefisien regresi 0,015 dan nilai

signifikansi 0,004 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Rora (2010) serta Nainggolan dan Purwanti (2016) yang menyatakan bahwa belanja daerah tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Liestiani (2008) dan Christina (2013) yang menyatakan belanja daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi belanja daerah maka pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah akan semakin besar. Hal ini disebabkan pemerintah daerah ingin menunjukkan prestasinya dari investasi yang mampu melayani masyarakat. Dengan demikian belanja daerah dapat dijadikan indikator dalam menentukan transparansi informasi keuangan daerah. Jadi, hasil analisis ini menerima hipotesis bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

4. Ukuran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah

Hasil pengujian keempat (H_4) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi pada tabel 4.16. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah dengan UP memiliki koefisien regresi 0,043 dan nilai signifikansi 0,006 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Verawaty (2015) dan Nainggolan dan Purwanti (2016) yang menyatakan ukuran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap

transparansi informasi keuangan daerah. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Rora (2010) dan Medina (2012) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ukuran pemerintah maka pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah akan semakin besar. pemerintah daerah yang memiliki ukuran pemerintah yang besar akan melakukan pengungkapan transparansi informasi yang tinggi. Dengan demikian ukuran pemerintah dapat dijadikan indikator dalam menentukan transparansi informasi keuangan daerah. Jadi, hasil analisis ini menerima hipotesis bahwa UP berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

5. Rasio Pembiayaan Hutang berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah

Hasil pengujian kelima (H_5) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi pada tabel 4.16. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa rasio pembiayaan hutang tidak berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah dengan RPH memiliki koefisien regresi -0,003 dan nilai signifikansi 0,943 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($=5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Laswad dkk (2005) dan Rora (2010) yang menyatakan bahwa rasio pembiayaan hutang memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian dan Medina (2012) dan Nainggolan dan Purwanti (2016) yang menyatakan rasio pembiayaan hutang tidak

memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang rasio pembiayaannya lebih tinggi cenderung akan mengurangi akses ke informasi keuangan pada situs resminya. Hal ini dikarenakan penggunaan hutang yang lebih tinggi sebagai sumber pembiayaannya akan memberikan sinyal kinerja pemerintah daerah yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang rasio pembiayaannya lebih besar cenderung akan membatasi akses pengguna ke informasi keuangannya. Pembatasan akses dapat memberikan dampak bahwa pemerintah daerah kurang transparan atas informasi keuangan yang dimilikinya. Dengan demikian RPH tidak dapat dijadikan indikator dalam menentukan transparansi informasi keuangan daerah. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa RPH berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

6. Tingkat Kompleksitas Pemerintah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah

Hasil pengujian keenam (H_6) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi pada tabel 4.16. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat kompleksitas pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah dengan TKP memiliki koefisien regresi 0,000 dan nilai signifikansi 0,977 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($=5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Rora (2010) dan Medina (2012) yang menyatakan bahwa tingkat kompleksitas pemerintah memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten

dengan hasil penelitian dan Syafitri (2012) serta Nainggolan dan Purwanti (2016) yang menyatakan tingkat kompleksitas pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kompleksitas pemerintah yang diukur dari besarnya penduduk tidak mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan transparansi informasi keuangannya. Dengan demikian TKP tidak dapat dijadikan indikator dalam menentukan transparansi informasi keuangan daerah. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa TKP berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

7. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah

Hasil pengujian ketujuh (H_7) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi pada tabel 4.16. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah dengan KLK memiliki koefisien regresi -4,412 dan nilai signifikansi 0,296 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Styles dan Tennyson (2007) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Akan tetapi, hasil analisis ini mendukung hasil penelitian Laswad dkk (2005) dan Nainggolan dan Purwanti (2016) yang menyatakan kualitas laporan keuangan tidak memiliki

berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya monitoring khusus yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengungkapkan opini atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan informasi laporan keuangannya. Dengan demikian KLK tidak dapat dijadikan indikator dalam menentukan transparansi informasi keuangan daerah. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa KLK berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah

8. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah

Hasil pengujian kedelapan (H_8) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi pada tabel 4.16. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah dengan TKM memiliki koefisien regresi 0,021 dan nilai signifikansi 0,005 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil analisis tersebut konsisten dengan hasil penelitian Nainggolan dan Purwanti (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Akan tetapi, hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Syafitri (2012) yang menyatakan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

Dari hasil ini disimpulkan bahwa adanya *political monitoring* oleh masyarakat dan semakin tinggi pula permintaan informasi kinerja pemerintah daerah pada *website* pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah akan lebih mengungkapkan informasi keuangannya. Dengan demikian TKM dapat dijadikan indikator dalam menentukan transparansi informasi keuangan daerah. Jadi, hasil analisis ini menerima hipotesis bahwa TKM berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

5. Kesimpulan dan saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor penentu transparansi informasi keuangan daerah dalam APBD pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2014. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama, pendapatan asli daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Hal ini berarti PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat belum bisa memotivasi pemerintah untuk dapat melakukan pengungkapan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Masyarakat cenderung hanya melaksanakan kewajiban tanpa menuntut hak. Peran pemerintah (agen) dan masyarakat (partisipal) kurang dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas dana transfer dirasa masih tinggi sehingga menyebabkan pengungkapan PAD tidak menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, dana alokasi umum (DAU) tidak memiliki pengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Alasan DAU tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah karena DAU merupakan dana transfer yang bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah dan jumlah yang dialokasikan pun tidak terlalu besar sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan transparansi informasi keuangannya.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga, belanja daerah (BD) memiliki pengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Hal ini disebabkan pemerintah daerah ingin menunjukkan prestasinya dari investasi yang mampu melayani masyarakat. Analisis ini mendukung teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi belanja daerah maka pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah akan semakin besar.
4. Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat, ukuran pemerintah (UP) memiliki pengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. analisis ini mendukung teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi total aset suatu pemerintah daerah maka pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah akan semakin besar. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki ukuran pemerintah yang besar akan melakukan pengungkapan transparansi informasi yang tinggi.

5. Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima, rasio pembiayaan hutang (RPH) tidak memiliki pengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. analisis ini tidak mendukung teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio pembiayaan hutang maka pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah akan semakin besar. bahwa pemerintah daerah yang rasio pembiayaannya lebih tinggi cenderung akan mengurangi akses ke informasi keuangan pada situs resminya. Hal ini dikarenakan penggunaan hutang yang lebih tinggi sebagai sumber pembiayaannya akan memberikan sinyal kinerja pemerintah daerah yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang rasio pembiayaannya lebih besar cenderung akan membatasi akses pengguna ke informasi keuangannya.
6. Berdasarkan hasil uji hipotesis keenam, tingkat kompleksitas pemerintah (TKP) tidak memiliki pengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Hal ini menunjukkan besarnya penduduk tidak mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan transparansi informasi keuangannya.
7. Berdasarkan hasil uji hipotesis ketujuh, kualitas laporan keuangan (KLK) tidak memiliki pengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Hal ini disebabkan tidak adanya monitoring khusus yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengungkapkan opini atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga tidak

mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan informasi laporan keuangannya.

8. Berdasarkan hasil uji hipotesis kedelapan, tingkat kesejahteraan masyarakat (TKM) memiliki pengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat maka pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah akan semakin besar. Hal ini disebabkan adanya *political monitoring* oleh masyarakat dan semakin tinggi pula permintaan informasi kinerja pemerintah daerah pada *website* pemerintah daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerapan *e-government* dalam bidang akuntansi khususnya transparansi informasi keuangan daerah melalui *e-government* supaya lebih banyak stakeholder publik yang bisa terjangkau dengan semakin berkembangnya pelaksanaan yang diatur Permendagri No.188.52/179/SJ tentang pentingnya peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pelaku bisnis dan industri.
2. Nilai *Adjusted R²* dari model yang di uji dalam penelitian ini sebesar 55,1% maka ada 44,9% variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah, sehingga peneliti selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk

menggunakan variabel lainnya seperti kompetensi politik dan ukuran legislatif.

3. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data laporan keuangan pemerintah yang paling baru dan periode waktu yang lebih panjang sehingga lebih terlihat perkembangan tingkat pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah. Selain itu, penelitian bisa ditingkatkan pada penilaian tingkat aksebilitas IFR.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2011. Penyajian Laporan Keuangan.
- Christiaens, J. 1999. *Financial Accounting Reform in Flemish Municipalities: An Empirical Investigation*. *Financial Accountability and Management* 15 (1), 21-40.
- Christina. 2013. *Pengaruh ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian daerah, rasio pembiayaan hutang, belanja daerah, dan tipe pemerintah daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah*. Tesis Fakultas Ekonomi USU.
- Craven, B., & Marston, C. 1999. *Financial reporting on the internet by leading UK companies*. *The European Accounting Review* 8 (2), 321-333.
- Gore, A.K. 2004. "The Effects of GAAP Regulation and Bond Market Interaction on Local Government Disclosures". *Journal of Accounting and Public Policy*. Volume 23, page 23 – 52.
- Hilmi, Amirudin Zul. 2010. *Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi*. Depok: Universitas Indonesia.
- Ingram, R. W. 1984. Economics Incentives and the choice of state Government Accounting Practices. *Journal of Accounting Research*. Volume 22 (1), pager 126-144.
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government.
- Jeckly, D. J., & Eka, A. S. 2014. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal pada kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN: 2302-8556.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. 2005. *Determinant of voluntary Internet financial reporting by local of local government authorities*. ELSEVIER.
- Lesmana, Sigit Indra. 2010. *Pengaruh karakteristik pemerintah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia*. Semarang
- Liestiani, A. 2008. *Pengungkapan LKPD kab/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006*. Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: Andi. Yogyakarta.
- Medina, F. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.
- Nainggola, A. T., & Purwanti, Dyah. 2016. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah via website*. STAN.
- Patrick, Patricia A. 2007. *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States-Pennsylvania. (Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals, Publication No. AAT 3266180).
- Permendagri No.188.52/179/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Puspita, Rora., & Dwi Martani. 2012. *Factors Influencing The Level of Vountary Disclosure on Government Websites in 2010*. Paper presented in Simposium Nasional Akuntansi 15, Balikpapan, 20-21 September 2012.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Rora, Puspita sari. 2010. *Pengaruh kinerja, tingkat ketergantungan dan karakteristik penda terhadap tingkat pengungkapan ssukarela pada situs pmda tahun 2010*. Skripsi sarjana. FEUI. Depok.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Selemba Empat, 2014 – Cetakan Kelima 1 jil., 286 hlm., 17 x 24 cm.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Buku 1. Jakarta: Selemba Empat.
- Serrano, Cinca., Carlos., Mar Rueda., Tomas., & Pilar, Portillo-Tarragona. 2008. *Faktor Influencing E-Disclosure in Local Publik Administrations*. Working Paper No. 2008-03, Facultad de Ciencias Economics y Empresariales, Universidad de Zaragoza.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. 2007. "The accessibility of financial reporting of u.s municipalities on the internet". *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. 19 (1), 56-92.
- Sugiyono. 2012. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabet. 2007.
- Suhardjanto, D., Yulianingtyas, R. 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Peng- untkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Sebelas Maret.
- Syafitri, Febriyani. 2012. *Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan*. Depok: Universitas Indonesia.
- Tuasikal, Askam, 2007, Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol.08, No.01, Februari 2007.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 157 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Verawaty. 2015. Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui E-Government Pemerintahan Daerah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi (SNA), 16-19 September 2015, USU, Medan.
- www.bpk.go.id Diakses Tanggal 25 Oktober 2016
- www.bps.go.id Diakses Tanggal 25 Oktober 2016
- www.menpan.go.id Diakses Tanggal 25 Oktober 2016
- www.djpk.depkeu.go.id Diakses Tanggal 25 Oktober 2016
- <http://sumsel.bps.go.id/> Diakses Tanggal 25 Oktober 2016